

# **PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI PULAU BAWEAN KABUPATEN GRESIK**

**Hasanul Bulqiyah<sup>1</sup>, Allan Firman Jaya<sup>2</sup>, Mario Fahmi Syahril<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Politik, Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban  
hasanulbulqiyah@unirow.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban  
allanfirman2@gmail.com

<sup>3</sup>Program Studi PPKn, Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban mariofahmi@unirow.com

## **ABSTRAK**

Kebijakan pemerintah menjadi pedoman dalam menerapkan dan membangun sistem yang problematis. Seperti halnya pada sektor pariwisata di Pulau Bawean Kabupaten Gresik, masih menjadi persoalan tidak dikelolanya pariwisata yang ada. Melalui kebijakan pemerintah yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, sudah seharusnya destinasi pariwisata yang ada di Pulau Bawean mampu menghasilkan ekonomi bagi masyarakat setempat. Faktanya dilapangan tidak ditemukan terkait manajemen pariwisata. Melalui metode kualitatif dengan jenis deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi peran kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata di Pulau Bawean dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gresik mengenai pariwisata tidak diimplementasikan di Pulau Bawean. Kebijakan yang ada tidak berperan secara sungguh-sungguh dalam pengembangan pariwisata yang ada di pulau Bawean sebagai peningkatan ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci: Kebijakan; Pariwisata; Pulau Bawean.**

## **ABSTRACT**

*Government policy becomes a guide in implementing and building problematic systems. As is the case with the tourism sector on Bawean Island, Gresik Regency, it is still a problem that has not been managed by existing tourism. Through government policy as stated in Gresik Regency Regional Regulation No. 8 of 2011 concerning Regional Spatial Planning, tourism destinations on Bawean Island should be able to generate economic benefits for the local community. In fact,*

*nothing was found in the field related to tourism management. Through qualitative methods with a descriptive type, it is used to explore the role of Gresik Regency government policy in improving the community's economy through the tourism sector on Bawean Island using observation, interviews and documentation as data collection techniques. The results of the research show that the Gresik Regency regional government policy regarding tourism is not implemented on Bawean Island. Existing policies do not play a serious role in developing tourism on Bawean Island to improve the community's economy*

***Kata Kunci: Policy; Tourist; Bawean Island.***

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan suatu wilayah tidak lepas dari peran pemerintah daerah sebagai pemegang tertinggi kekuasaan di wilayah otonomi tersebut. Terlebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat juga di dukung dari program-program pemerintah yang di bentuk melalui sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah. Seperti di Pulau Bawean yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Gresik dan memiliki dua administrasi wilayah kecamatan yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Negara-negara yang telah mengelola sektor kepariwisataannya secara intensif khususnya adalah negara yang potensi wisatanya tidak begitu menonjol, namun karena ditangani secara profesional menjadi industri (James, 1987:40). UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus serta menjalankan kepentingan dari aspirasi masyarakat setempat.

Berangkat dari Undang-Undang tersebut seharusnya Pemerintah Daerah

Kabupaten Gresik mampu mengelola wilayahnya dalam berbagai sektor yang ada. Sehingga tumpang tindih pembangunan atau pemerataan tidak dirasakan oleh masyarakat. Faktanya, Kabupaten Gresik yang merupakan wilayah yang berdampingan dengan Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi itu lebih banyak dari sektor industri pabrik.

Potensi pariwisata di Pulau Bawean cukup besar namun tidak di kelolah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Berbagai potensi pariwisata ini yakni wisata alam (air terjun, pantai, pegunungan, dan titik-titik pemandangan di setiap sudut Bawean), wisata buatan, wisata budaya, wisata kuliner, dan lain sebagainya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gesik masih dinilai lemah dalam memperkenalkan wisata bahari

pulau Bawean ke kancah Nasional bahkan Internasional.

Menurut George C. Edwards, implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan dan keonsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang menjadi sasaran dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut mungkin akan mengalami kegagalan sementara itu. Suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan baik mungkin akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan (Winarno, 2013:177).

Upaya dalam pengembangan pariwisata harus ada peran dari berbagai pihak terutama masyarakat sekitar, seperti mengenalkan mutu produk pariwisata, dan juga pemberdayaan kelompok pengusaha. Kualitas asli produk pariwisata menjadi perihal yang utama, keunikan, dan juga ciri khas daerah serta kebanggaan daerah yang menjadikan gaya hidup masyarakatnya secara khusus yang berkaitan dengan perilaku, keramahan dan kesungguhan penduduk yang tinggal di daerah tersebut. (Bulqiyah, 2017:3).

Rekonstruksi pembangunan berbasis SDA (Sumber Daya Alam) mutlak diperlukan dengan menempatkan SDA bukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga

memosisikan SDA sebagai sumber keberlanjutan pembangunan (ekonomi) (Ahmad, 2009:215). Saat ini banyak kendala-kendala yang di hadapi pulau Bawean dalam menjadikan sebagai pulau pariwisata. Mulai dari kurang memadainya infrastruktur transportasi penghubung tanah jawa ke tanah pulau Bawean, akses jalan yang masih sempit dan masih belum layak dikatakan sebagai destinasi wisata untuk dilalui kendaraan besar dan belum adanya kesiapan masyarakat dengan adanya pariwisata di pulau Bawean, seperti kurang adanya produksi atau jasa dalam pelayanan wisatawan. serta kurangnya sosialisasi yang perlu dilakukan terus menerus oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik.

Melalui potensi pariwisata di pulau Bawean ini menjadi *leading sector* yang dapat memacu pertumbuhan *sector-sector* lain seperti perhotelan, kuliner, sector transportasi umum, home industry, pengembangan home stay, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, bahwa perlu adanya pengembangan dan eksploitasi promosi pariwisata pulau Bawean, karena dapat dijadikan suatu sumber penghasilan baru yang dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (Poerwadarminto, 1999:735). Sehingga jika diartikan subjektif peran dapat diartikan sebagai penentu dalam hal apapun yang melatarbelakangi persoalan.

Edwards membicarakan empat faktor atau variabel yang krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.

Dalam pengembangan pariwisata diperlukan adanya suatu lembaga terkait yang menjadikan pariwisata di daerah menjadi pilihan berkunjung objek wisata yang baik oleh wisatawan. Pengelolaan pengembangan pariwisata menurut Leiper (Pitana, 2009:32).

## **METODE**

Penelitian kuantitatif digunakan untuk mengeksplorasi mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Bappeda, Disbudparpora, UPT Pariwisata Bawean dan Tokoh Masyarakat Bawean menjadi subyek dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai data-data yang diperlukan.

Dalam pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi teknik untuk mendapatkan data-data yang sesuai, kemudian data-data tersebut dapat dilakukan analisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisa data untuk proses penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Wisadirana, 2005:101). Teknik pengumpulan data yang di gunakan yakni pengumpulan data, reduksi data dan display data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Pariwisata di Pulau Bawean**

Sarana dan parwana sangat penting dalam menunjang keberhasilan dari pengembangan pariwisata, pariwisata yang ada di pulau Bawean sangat minim sekali dengan yang namanya sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas yang mendukung lancarnya pariwisata pulau Bawean. Pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana pariwisata meliputi penyediaan jembatan, air bersih, kamar mandi, listrik, telepon, home stay, restoran dan lainnya.

mengacu pada salah satu faktor yang telah dipaparkan oleh Edwards bahwasanya banyak kebijakan masuk ke dalam “zona ketidakacuhan”. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan

lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana kebijakan.

Kebijakan mengenai pariwisata di Pulau Bawean sudah di desain sedemikian rupa seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Secara khusus memang peraturan kebijakan yang ada tidak terpusat di pulau Bawean. Artinya kebijakan ini merupakan peraturan daerah Kabupaten Gresik mencakup pulau Bawean, dan daerah wilayah Kabupaten Gresik yang lain. Dengan demikian karena pulau Bawean merupakan bagian dari Kabupaten Gresik sudah sepatutnya kebijakan yang ada juga terimplementasi pada wilayah di Pulau Bawean.

Pada peraturan tersebut, jelas disebutkan bahwa objek pariwisata yang berada di Pulau Bawean menjadi salah satu objek pariwisata yang terdaftar oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Sarana dan prasarana dalam memajukan objek atau destinasi pariwisata juga di dukung dalam peraturan yang ada. Terlebih Visi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Keolahragaan “*Gresik Sebagai Kota Tujuan Wisata Dengan Masyarakat Yang Santun, Mandiri, Sehat dan Religious*”. Apabila fasilitas serta sarana dan prasaran di setiap destina wisata terpenuhi, maka

wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dalam melakukan kegiatan wisata di destinasi wisata tersebut. Dengan demikian perekonomian masyarakat di daerah setempat objek/destinasi wisata akan semakin meningkat dengan ramainya pengunjung ke destinasi wisata.

### **Tidak Adanya Fasilitas Pariwisata**

Akseibilitas dalam pariwisata salah satu komponen yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, karena berkenaan dengan tingkat kemudahan seorang wisatawan mencapai suatu objek wisata. Akseibilitas dalam pariwisata salah satu komponen yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, karena berkenaan dengan tingkat kemudahan seorang wisatawan mencapai suatu objek wisata.

Dalam hal pembangunan serta pengembangan akseibilitas untuk menuju ke lokasi destinasi/obyek wisata sangat dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung dan nantinya berharap bisa berkunjung kembali dengan wisatawan-wisatawan yang lain. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) di Kabupaten Gresik merupakan penajaman dari destinasi pariwisata daerah yang bertujuan untuk mempermudah dalam membagi paket paket wisata yang dapat ditawarkan di Kabupaten Gresik.

Adapun pembagian kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) di Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gresik antara lain :

KSPD Bawean Utara terdiri dari Pantai Tinggen (Kec. Sangkapura), Penangkaran Rusa Bawean (Kec. Sangkapura), Pantai Tandjung Ke'en (Kec. Sangkapura), Pulau Cina (Kec. Tambak), Pantai Nyimas (Kec. Sangkapura), Pantai Labuhan (Kec. Tambak), Pantai Hutan Lindung (Kec. Sangkapura), dan Danau Kastoba (Kec. Tambak).

KSPD Bawean Timur terdiri dari Air Panas Kebondaya (Kec. Sangkapura), Kawasan Pantai Selayar (Kec. Sangkapura), Air Terjun Udhuk-Udhuk (Kec. Sangkapura), Air Terjun Laccar (Kec. Tambak), Air Terjun Patar Selamat (Kec. Sangkapura), Pulau Noko dan Pulau Gili (Kec. Sangkapura), serta Danau Kastoba (Kec. Sangkapura).

## **SIMPULAN**

Pembangunan pariwisata didasari dari potensi yang dimiliki serta melihat peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Setiap regulasi yang dibentuk menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dibentuknya regulasi kebijakan tersebut.

Namun bagaimana yang terjadi jika regulasi yang bentuk tidak memiliki dampak yang di harapkan ? seperti kebijakan mengenai pariwisata yang ada

di pulau Bawean yang seharusnya peran dari kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan-persoalan yang menjadi dasar di bentuknya kebijakan tersebut. Tidak terimplementasi dengan maksimal merupakan bentuk gagalnya kebijakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Yustika, E. 2009. *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bulqiyah, Hasanul. 2017. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam Mewujudkan Pulau Bawean Sebagai Pulau Pariwisata di Kabupaten Gresik*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang
- James, Spillane J. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- Pitana I Gde & Surya Diarta I Ketut, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta, C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI), hal. 38
- Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka,1999)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. CAPS (Center Of Academic Publishing Service). Yogyakarta

Wisadirana, Darsono. 2005. *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi: Untuk Ilmu Sosial*. UMM Press, Malang.